

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Keberadaan teknologi informasi menjadi suatu kebutuhan mendasar dalam menunjang aktivitas manusia maupun organisasi saat ini. Pemanfaatan teknologi informasi ini menjadi suatu keharusan dalam setiap organisasi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi, melalui berbagai bentuk aplikasi teknologi informasi. Sistem informasi merupakan suatu bagian dari aplikasi teknologi informasi yang memuat proses yang kompleks dari aktivitas organisasi dengan tujuan mempercepat pekerjaan di dalam organisasi.

Penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan dapat dirasakan manfaatnya diantaranya membantu dalam mengolah administrasi tata usaha, pelayanan terhadap masyarakat, pengambilan keputusan, hingga mampu mengembangkan komputerasi dalam memeriksa transaksi keuangan pada organisasi, serta dapat menyediakan kebutuhan masyarakat dalam bentuk informasi dengan cepat, mudah, transparan dan akuntabel.

Pemerintah sudah menetapkan program pembangunan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yaitu *E-Government*, dengan tujuan agar terbentuknya tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*) sehingga bisa memperkecil kemungkinan melakukan tindak praktik KKN. *E-Goverement* atau bisa disebut Pemerintahan elektronik merupakan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah dalam pemberian informasi dan pelayanan kepada

masyarakat serta terjalinnya hubungan pemerintah dengan pihak lain. Penerapan *E-Government* pada pemerintahan saat ini sudah banyak diterapkan diberbagai daerah dan berbagai bidang, termasuk bidang keuangan daerah. Dalam bidang keuangan teknologi informasi dapat hadir sebagai alat dalam menyediakan informasi terkait dengan keuangan secara komprehensif kepada masyarakat, sehingga masyarakat ikut andil dalam mengawasi keuangan daerah. Karena realitanya, pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah ini masih banyak terdapat permasalahan dan tantangan.

Merujuk dari yang telah diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam (Barlian, 2017) diantaranya tidak sedikit daerah yang masih belum memenuhi belanja mandatori atau yang diharuskan undang-undang dan belum semua daerah menunaikan kewajiban dalam menyediakan anggaran untuk pendidikan, kesehatan dan infrastruktur sesuai dalam Undang-undang.

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan bentuk perwujudan untuk dipakai pemerintah daerah dalam memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah. Sebagaimana terdapat dalam PP No. 56 Tahun 2005 yang sudah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, bahwa guna memperluas pemanfaatan kecanggihan teknologi informasi dan mengembangkan kemampuan dalam mengatur keuangan daerah, serta menyampaikan informasi perihal keuangan daerah. Dalam hal ini pemerintah harus memaksimalkan kecanggihan teknologi informasi dengan membentuk suatu hubungan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang selaras dengan akses kerja serta satuan kerja yang sederhana.

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah aplikasi yang diciptakan oleh Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI sebagai upaya percepatan dalam pengiriman data dan efisiensi untuk menghimpun data keuangan daerah. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah ini memfasilitasi kegiatan penganggaran, perencanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya aplikasi tersebut semakin memberikan kemudahan kepada pegawai dalam pengelolaan keuangan daerah dan dapat menyampaikan informasi keuangan daerah yang akurat.

Dengan begitu diharapkan dengan adanya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah ini, dapat menyajikan informasi berkualitas yang sesuai dengan realita yang ada serta dapat dipertanggungjawabkan. Sistem yang digunakan pada sistem informasi pengelolaan keuangan daerah harus berkualitas sehingga penggunaannya yang dapat dimaksimalkan. Layanan yang diberikan oleh sistem informasi pengelolaan keuangan daerah ini harus berkualitas. Pengguna diharapkan dapat memaksimalkan penggunaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dalam menunjang pekerjaannya. Sehingga dapat merasakan kepausan dari penggunaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah ini. Kemudian pada akhirnya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah ini dapat memberikan mafaat bersih yang dapat dirasakan oleh para pengguna dari sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang menggunakan SIPKD

untuk mengelola keuangan daerah. Berikut data realisasi anggaran program dan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan,

**Tabel 1. 1**  
**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan**

No	Tahun 2019		Target Kinerja		Ket
	Nama Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	
Program Peningkatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah					
1.	Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang Terintegrasi;	150.000.000,-	148.037.000,-	98.69	
2.	Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah;	350.000.000,-	346.607.000,-	99.03	
3.	Pengelolaan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Gaji;	174.694.000,-	166.340.750,-	95.22	

*Sumber : Lakip Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019*

Berdasarkan data realisasi anggaran program dan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah belum mencapai anggaran indikatif yang direncanakan 100%. Seperti pada kegiatan Peningkatan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) yang terintegrasi dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- hanya mampu terealisasi sebesar Rp. 148.037.000,- dan prosentase ketercapaian sebesar 98.69%. Pada kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 350.000.000 dapat terealisasi sebesar Rp. 346.607.000,- dan prosentase ketercapaian 99.03%.

Kemudian pada kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Gaji dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 174.694.000,- realisasi anggaran hanya sebesar Rp. 166.340.750 dan prosentase 95.22%. Dengan demikian, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan ternyata masih terdapat beberapa masalah dalam penggunaan SIPKD. Masalah-masalah tersebut diduga mempengaruhi terhadap realisasi anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan.

Masalah yang terdapat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diantaranya: 1) belum maksimalnya pemanfaatan program aplikasi pengelolaan keuangan dan aset daerah, dan 2) belum optimalnya pengembangan teknologi informasi pengelolaan keuangan daerah. Hal ini membuat pelaksanaan program dan kegiatan menjadi kurang maksimal. Sehingga

Dari permasalahan yang diinformasikan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam, karena dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik harus terus dimaksimalkan agar apa yang direncanakan dapat terapai. Berdasar pada latar belakang masalah tersebut, maka peneliti memandang perlu untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan, yang dituangkan dalam judul skripsi yang berjudul **“Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuningan”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari pemaparan masalah yang sudah disampaikan pada latar belakang masalah, maka identifikasikan permasalahannya adalah:

1. Pemanfaatan program aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan kurang maksimal.
2. Pengembangan teknologi informasi informasi pengelolaan keuangan daerah yang masih belum optimal.
3. Penyusunan laporan keuangan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang belum optimal.
4. Kinerja dalam penyusunan pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal.
5. Kesadaran SDM yang masih rendah untuk meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
6. Belum terinventarisir aset-aset yang menjadi milik daerah secara lengkap.

## **C. Rumusan Masalah**

Setelah disampaikan beberapa permasalahan yang ada pada latar belakang masalah, peneliti dapat merumuskan rumusan masalah yang menjadi fokus peneliti, dalam penelitian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu:

1. Bagaimana Kualitas Informasi dari Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah?

2. Bagaimana Kaulitas Sistem dari Sistem Infromasi Pengelolaan Keuangan Daerah?
3. Bagaimana Kauliats Layanan dari Sistem Infromasi Pengelolaan Keuangan Daerah?
4. Bagaimana Penggunaan dari Sistem Infromasi Pengelolaan Keuangan Daerah?
5. Bagaimana Kepusan Pengguna dari Penggunaan Sistem Infromasi Pengelolaan Keuangan Daerah?
6. Bagaimana Manfaat Bersih dari Penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasar pada rumusan masalah yang disampaikan, maka tujuan dari pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui,

1. Kualitas Infromasi dari Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Kaulitas Sistem dari Sistem Infromasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Kaulitas Layanan dari Sistem Infromasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Penggunaan dari Sistem Infromasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Kepusan Pengguna dari Penggunaan Sistem Infromasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Manfaaat Bersih dari Penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### **E. Manfaat Hasil Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini terbagi kedalam dua yaitu:

1. Kegunaan teoritis, merupakan hasil dari penelitian yang diharapkan mampu menjadi sarana dalam memperluas dan menambah wawasan serta dapat menjadi dokumen akademik sebagai panduan untuk melakukan penelitian selanjutnya.
2. Kegunaan praktis, merupakan hasil dari penelitian yang diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata yang dituangkan dalam bentuk pemikiran tertulis kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah terkait pelaksanaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Kegiatan administrasi publik dalam penyelenggaraan pemerintah sangat diperlukan sebagai pelaksanaan dari kebijakan publik yang difokuskan pada aspek manajemen. Artinya administrasi publik berkenaan dengan pengelolaan pelayanan publik, dan penyediaan berbagai kebutuhan publik serta pengembangan kinerja pegawai sehingga dapat lebih efektif dan efisien.

Untuk menunjang pelaksanaan tersebut, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang diberikan pemerintah pusat untuk terselenggaranya pemerintahan yang sepaham dengan tatanan pemerintah yang baik (*good governance*). Seperti halnya dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah harus dapat mengelola keuangan daerah dengan mengoptimalkan sumber dana yang dimiliki. Artinya dalam pelaksanaan perencanaan anggaran harus benar-benar tepat, begitu seterusnya pada tahap pelaksanaan anggaran dan tahap pelaporan anggaran.



Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan *Good Governance* adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada pada bidang pengelolaan keuangan daerah. Adanya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah ini juga merupakan suatu upaya dalam pemanfaatan dan penerapan *E-Government*. Selain itu, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah ini dapat menjadi sarana dalam pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan referensi, serta menjadi proses transfer data dan informasi keuangan daerah antara Departemen Keuangan dan Departemen Dalam Negeri dengan Pemerintah daerah dan pengguna informasi keuangan daerah lainnya.

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah ini hadir agar memudahkan dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh daerah dan menyediakan informasi keuangan kepada masyarakat yang akurat dan akuntabel. Namun terkadang dalam pelaksanaan masih terdapat kendala yang dialami pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pada penelitian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah ini peneliti menggunakan model keberhasilan sistem informasi dari DeLone dan McLean, karena diharapkan mampu memberitahu gambaran mengenai pelaksanaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten kuningan.

Adapun Model Keberhasilan sistem informasi menurut DeLone & McLean dalam (Jogiyanto, 2007) adalah sebagai berikut:

a. Kualitas Informasi (*Information Quality*)

Kualitas Informasi ini dipakai untuk memperkirakan seperti apa keluaran dari sistem informasi yang dihasilkan.

b. Kualitas Sistem (*System Quality*)

Kualitas Sistem ini dapat dipakai dengan mengukur dari aspek perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan .

c. Kualitas Layanan (*Service Quality*)

Kualitas layanan merupakan suatu persepsi atas layanan yang nyata dengan melakukan perbandingan.

d. Penggunaan (*Use*)

Penggunaan ini dimaksudkan seberapa sering aplikasi atau sistem informasi ini digunakan.

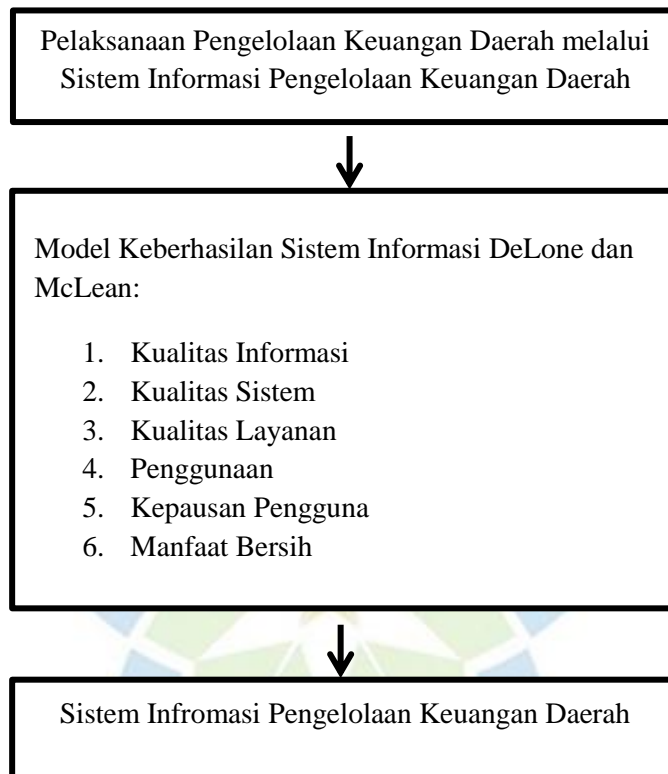
e. Kepuasan Pengguna (*User Satisfaction*)

Kepuasan pengguna dapat dirasakan melalui respond yang diberikan oleh pengguna setelah menggunakan sistem informasi.

f. Hasil Bersih (*Net Benefit*)

Hasil bersih atau mafaat yang dapat diperoleh baik oleh perseorangan maupun organisasi. Dimensi yang digunakan sebagai berikut:

Berdasarkan pada kerangka pemikiran diatar, maka kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1. 1**  
**Kerangka Pemikiran**